



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3313102512880002	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198812252025211034	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DIAN EKA NUGROHO	A7. NIK : 3313102512880002
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,255,750
3.	TUNJANGAN ANAK	251,150
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,086,300
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	683,170
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	15,833,870
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	791,694
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	668,059
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,459,753
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14,374,117
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	14,374,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 09 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3313144811900002	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199011182025211029	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : HENDRO WIBOWO	A7. NIK : 3313141811900002
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,255,750
3.	TUNJANGAN ANAK	251,150
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,086,300
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	683,170
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	15,833,870
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	791,694
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	668,059
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,459,753
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14,374,117
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	14,374,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002

D.4 Tanggal
KARANGANYAR, 09 January 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 702983990528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198309042025211019	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DANDI PURWANTO	A7. NIK : 3313150409830001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,255,750
3.	TUNJANGAN ANAK	502,300
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,448,400
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	693,635
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	16,457,585
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	822,879
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	679,989
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,502,868
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14,954,717
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	14,954,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 09 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3313092707800003	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198007262025211021	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : MUHAMMAD CHOZINAL FAUZI	A7. NIK : 3313092707800003
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	362,100
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	622,950
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	13,542,550
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	677,128
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	596,481
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,273,609
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	12,268,941
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	12,268,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 09 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 607140209528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199202272025211030	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : FEBRIAN KURNIA PUTRA	A7. NIK : 3313092702920001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	362,100
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	622,950
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	13,542,550
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	677,128
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	596,481
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,273,609
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	12,268,941
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	12,268,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 09 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3314101203970003	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199703122025211015	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : AMAR WISNU PRASETYO	A7. NIK : 3314101203970003
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,255,750
3.	TUNJANGAN ANAK	251,150
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,086,300
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	683,170
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	15,833,870
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	791,694
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	668,059
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,459,753
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14,374,117
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	14,374,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 09 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-09-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3313130507980006	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199807052025211017	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : KURNIAWAN AGUNG NUGROHO	A7. NIK : 3313130507980006
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / 5 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	12,557,500
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,255,750
3.	TUNJANGAN ANAK	150,690
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	941,460
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	679,182
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	15,584,582
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	779,229
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	663,287
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,442,516
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14,142,066
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	14,142,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 09 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP	: 946670677528000	A5. NAMA JABATAN :	
A2. NIP/NRP	: 198406282024211008	NON FUNGSIONAL	
A3. NAMA	: ARI WITANTO	A6. JENIS KELAMIN :	☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ GOLONGAN	: Pengatur / 7	A7. NIK	: 3313112806840001
		A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	39,546,733
2.	TUNJANGAN ISTRI	3,954,673
3.	TUNJANGAN ANAK	1,581,869
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,007,240
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1,894,953
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	50,985,468
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,549,273
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,857,648
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,406,921
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	46,578,547
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	46,578,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	87,734
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	null	D.4 Tanggal	
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 06 January 2026	
D.3 ID Instansi Pemerintah	:	198104272009021002		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 576906820433000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199104262024211009	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : YOGI APRIYANTO,	A7. NIK : 3215292604910001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / 7 GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	39,546,733
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,001,810
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1,702,597
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	42,251,140
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,112,557
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,629,516
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	3,742,073
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	38,509,067
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	38,509,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	58,821
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 06 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 463063040528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197902262010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : KRIS WAHYU JOKO PURNOMO	A7. NIK : 3313092602790004
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda Tk.I / II/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	40,217,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,021,780
3.	TUNJANGAN ANAK	1,608,712
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,510,320
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	54,414,132
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,720,707
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,866,680
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,587,387
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	49,826,745
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	49,826,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	153,098
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 721137792528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198002142012121001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : EKO HARDIYANTO	A7. NIK : 3313111402800001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,396,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,739,680
3.	TUNJANGAN ANAK	1,895,872
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,852,572
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	62,940,444
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,147,022
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,203,114
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,350,136
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	57,590,308
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	57,590,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	175,657
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109916528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198006242010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SULARTO	A7. NIK : 3313092406800011
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	1,918,112
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,875,628
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,597,340
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,179,867
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,225,695
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,405,562
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,191,778
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,191,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	178,904
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 899726319528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198501032011011012	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : TRI WIBOWO	A7. NIK : 3314030301850002
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	54,867,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,486,740
3.	TUNJANGAN ANAK	2,194,696
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,276,064
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	71,880,420
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,594,021
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,546,631
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,140,652
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	65,739,768
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	65,739,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	303,260
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 481027159528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 196804181989031006	
A3. NAMA : TRI HARYONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A7. NIK : 3313111804680001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	73,290,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	7,329,000
3.	TUNJANGAN ANAK	2,617,500
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,838,260
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,718,914
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	98,353,674
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,917,684
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,391,757
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	8,309,441
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	90,044,233
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	90,044,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	22,544,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,127,200
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,127,200
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,858,801
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678110842528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196905211992101001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DAGDO PRAMONO	A7. NIK : 3313052105690001
A4. PANGKAT/ : Penata Muda Tk.I / III/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	58,975,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,897,500
3.	TUNJANGAN ANAK	505,500
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,462,280
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,405,916
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	73,246,196
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,662,310
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,661,247
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,323,557
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	66,922,639
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	66,922,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	8,422,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	421,100
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	421,100
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	389,366
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 776232183528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197106161993031007	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : MARGONO	A7. NIK : 3313091606710002
A4. PANGKAT/ : Penata Muda Tk.I / III/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60,831,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,083,140
3.	TUNJANGAN ANAK	1,824,942
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,548,580
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,533,436
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	77,821,498
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,891,075
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,794,551
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,685,626
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	71,135,872
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	71,135,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	8,135,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	406,700
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	406,700
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	440,882
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678111022528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198104272009021002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DJOKO NUGROHO	A7. NIK : 3313102704810004
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,893,395
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,789,340
3.	TUNJANGAN ANAK	1,915,736
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,927,987
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,581,978
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,179,099
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,226,198
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,405,297
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,176,681
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,176,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	177,401
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 57571388528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197107021996121002	
A3. NAMA : JOKO PURWANTO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 3313090207710001
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	71,052,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	7,105,280
3.	TUNJANGAN ANAK	1,421,056
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	13,720,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,784,664
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	100,125,440
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5,006,272
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,240,008
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	8,246,280
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	91,879,160
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	91,879,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	28,879,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,443,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,443,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,893,612
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 786306035528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198210302005021001	
A3. NAMA : SUKINO SUBIYANTORO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A7. NIK : 3313093010820002
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	57,996,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,799,640
3.	TUNJANGAN ANAK	2,319,856
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,008,098
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	80,739,514
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,036,976
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,695,804
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,732,780
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	74,006,734
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	74,006,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	6,506,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	325,300
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	325,300
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	567,298
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 854613403445000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 199512142018081001	
A3. NAMA : EFAN RISWAYA PRATAMA	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata / III/c	A7. NIK : 3272051412950002
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,499,600
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,649,960
3.	TUNJANGAN ANAK	929,992
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,428,380
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	65,109,572
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,255,479
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,120,382
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,375,861
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	59,733,711
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	59,733,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	183,136
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 579960071528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197010222007011022	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUNARTO	A7. NIK : 3313042210700002
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	51,555,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,155,500
3.	TUNJANGAN ANAK	810,150
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,824,380
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,074,836
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	65,419,866
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,270,993
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,340,413
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,611,406
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	59,808,460
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	59,808,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	1,308,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	65,400
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	65,400
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	277,832
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 579960063528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197606072008011008	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUWARNO	A7. NIK : 3313090706760002
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	51,555,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,155,500
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,047,740
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,786,000
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,189,300
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,308,928
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,498,228
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,287,772
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,287,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	313,810
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 11-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-11-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580067809528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197606271995121001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : BURHAM BARLIANTO	A7. NIK : 3313092706760002
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	55,177,900
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,517,790
3.	TUNJANGAN ANAK	1,866,320
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,765,840
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,246,962
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	71,574,812
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,578,741
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,560,220
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,138,961
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	65,435,851
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	65,435,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	2,435,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	121,700
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	121,700
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	294,874
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 103061803528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198601042010011003	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : ARI SETYAWAN	A7. NIK : 3313090401860003
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda Tk.I / II/b GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	41,484,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,148,480
3.	TUNJANGAN ANAK	1,659,392
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,570,524
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	55,918,716
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,795,936
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,925,487
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,721,423
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	51,197,293
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	51,197,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	157,326
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 893976787528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197104152009021002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : ALIF SISWOHADI SUTIKNO	A7. NIK : 3313091504710002
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	49,401,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,940,180
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,931,738
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,301,478
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,065,074
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,215,740
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,280,814
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,020,664
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,020,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	278,111
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 888485539528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197307032007011013	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : MARYONO	A7. NIK : 3313150307730005
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,886,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,788,600
3.	TUNJANGAN ANAK	1,644,264
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,765,840
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,868,178
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	62,952,882
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,147,644
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,216,262
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,363,906
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	57,588,976
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	57,588,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	174,413
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 893976746528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197308142009021001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SANTOSA	A7. NIK : 3313111408730004
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	42,738,710
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,273,880
3.	TUNJANGAN ANAK	1,709,552
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,632,046
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	57,409,708
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,870,485
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,986,597
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,857,082
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	52,552,626
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	52,552,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	160,254
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580111128528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197405122010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DWI HANDONO	A7. NIK : 3313041205740002
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	959,056
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,843,304
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,592,080
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,079,604
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,186,648
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,266,252
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,325,828
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,325,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	173,210
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678110966528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197503292010011001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUMITRO	A7. NIK : 3313102903750000
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	959,056
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,843,304
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,592,080
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,079,604
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,186,648
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,266,252
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,325,828
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,325,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	173,210
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109965528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198404182010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : TRI AGUS PAMUNGKAS	A7. NIK : 3313091804840001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	1,918,112
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,875,628
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,597,340
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,179,867
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,225,695
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,405,562
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,191,778
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,191,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	178,904
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 559796719528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198406102010011028	
A3. NAMA : SRI ARIYA SANJAYA	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A7. NIK : 3313091006840002
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	54,867,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	1,013,880
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,593,204
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	66,034,484
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,301,724
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,233,887
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,535,611
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	60,498,873
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	60,498,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	6,498,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	324,900
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	324,900
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	324,768
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	132

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 899726327532000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 198703252011012019	
A3. NAMA : RIRIN SETIAWATI	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A7. NIK : 3311086503870001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	54,867,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,486,740
3.	TUNJANGAN ANAK	1,881,168
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6.	TUNJANGAN BERAS	3,765,840
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,846,602
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	76,407,750
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,820,388
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,535,462
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,355,850
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	70,051,900
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	70,051,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	16,051,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	802,500
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	802,500
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	685,056
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	125,544

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 740958277528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197109092009021001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SEMIN	A7. NIK : 3313150909710001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	43,240,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,324,040
3.	TUNJANGAN ANAK	1,729,616
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,652,396
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	58,001,972
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,900,099
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,006,972
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,907,071
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	53,094,901
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	53,094,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	163,182
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109932528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198201122010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : CATUR IRIYANTO	A7. NIK : 3313151201820003
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	1,918,112
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,875,628
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,597,340
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,179,867
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,225,695
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,405,562
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,191,778
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,191,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	178,904
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 5-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-05-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 776232134528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 196705151993031018	
A3. NAMA : EKO ISMARYONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 3313091505670003
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	33,442,900
2.	TUNJANGAN ISTRI	3,344,290
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	3,780,000
6.	TUNJANGAN BERAS	1,013,880
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1,384,048
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	42,965,118
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,148,256
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,243,665
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	3,391,921
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	39,573,197
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	39,573,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	729,151
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 899278634528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196806102010011004	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUTARYO	A7. NIK : 3313091006680001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	959,056
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,843,304
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,592,080
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,079,604
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,186,648
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,266,252
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,325,828
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,325,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	173,210
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 486571680527000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197804031997031003	
A3. NAMA : BAKDO HARSONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina Utama Muda / IV/c GOLONGAN	A7. NIK : 3309050304780001
	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	72,548,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	7,254,800
3.	TUNJANGAN ANAK	2,901,920
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	28,350,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,405,388
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	119,515,628
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5,975,781
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,367,264
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	9,343,045
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	110,172,583
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	110,172,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	42,672,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	2,133,600
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	2,133,600
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	3,126,627
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 736944448528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197910242008011006	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SURADI	A7. NIK : 3313042410790001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	44,601,200
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,460,120
3.	TUNJANGAN ANAK	1,784,048
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,717,540
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	59,618,428
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,980,921
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,070,133
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,051,054
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	54,567,374
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54,567,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	167,720
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678107699528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196904192008011007	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : AGUS PRIHANTORO	A7. NIK : 3313101904690001
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	52,715,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	5,271,500
3.	TUNJANGAN ANAK	1,054,300
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	3,041,640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,140,375
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	67,222,815
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,361,141
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,406,449
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,767,590
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	61,455,225
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	61,455,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	281,824
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 077301596831000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197306171992032003	
A3. NAMA : YUNIAR SRI MURDASIH	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 7271015706730004
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	71,052,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	1,421,056
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	13,720,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,540,688
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	91,762,304
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,588,115
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,950,721
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,538,836
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	84,223,468
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	84,223,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	30,223,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,511,100
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,511,100
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,883,500
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 666667712528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197507042007011008	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SAMINO	A7. NIK : 3313090407750001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Muda / II/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	37,408,000
2.	TUNJANGAN ISTRI	3,740,800
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,326,204
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	47,502,764
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,375,138
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,675,344
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,050,482
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	43,452,282
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	43,452,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	133,572
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109973526000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197802082010011004	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUPRIYANTA	A7. NIK : 3372040802780024
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,795,280
3.	TUNJANGAN ANAK	1,918,112
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,875,628
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	63,597,340
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,179,867
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,225,695
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,405,562
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	58,191,778
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	58,191,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	178,904
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 486582711528000	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197305281993031007	
A3. NAMA : BUDI CAHYONO	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a	A7. NIK : 3313092805730003
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	69,347,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,934,780
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	13,720,000
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,660,683
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	95,691,023
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,784,551
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,109,262
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,893,813
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	87,797,210
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	87,797,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	29,297,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1,464,800
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	1,464,800
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	2,111,678
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	KARANGANYAR, 05 January 2026
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 732341508528000	A5. NAMA JABATAN : PERENCANA AHLI MUDA
A2. NIP/NRP : 197903252006041005	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DONO NUGROHO	A7. NIK : 3311042503790002
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60,846,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,084,680
3.	TUNJANGAN ANAK	2,433,872
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	15,400,000
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,407,900
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	92,228,772
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,611,439
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,824,161
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	7,435,600
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	84,793,172
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	84,793,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	17,293,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	864,600
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	864,600
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	1,336,084
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 893222133526000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198004142005011007	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : APRI DARMAWAN	A7. NIK : 3372011404800022
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60,216,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	6,021,680
3.	TUNJANGAN ANAK	2,408,672
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,528,088
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	78,230,760
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,911,538
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,794,920
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	6,706,458
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	71,524,302
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	71,524,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	4,024,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	201,200
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	201,200
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	440,040
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 580109924528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198405052010011002	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : WARSITO	A7. NIK : 3313090505840001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	47,952,800
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,013,880
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,645,804
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	53,612,484
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,680,624
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	1,952,364
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,632,988
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	48,979,496
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	48,979,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	225,972
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 678107632528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 198407132010011003	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : PEDET SUGIYARTO	A7. NIK : 3313091307840001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	46,488,400
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,648,840
3.	TUNJANGAN ANAK	1,859,536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,806,384
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	61,858,680
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,092,934
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,157,726
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5,250,660
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	56,608,020
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56,608,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	174,018
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-01-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 668660657528000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 197001282007011006	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : SUGIMIN	A7. NIK : 3313082801700001
A4. PANGKAT/ : Pengatur Tk.I / II/d GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	45,005,566
2.	TUNJANGAN ISTRI	4,500,560
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	4,678,160
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	56,212,046
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2,810,602
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,018,625
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	4,829,227
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	51,382,819
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	51,382,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	235,094
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 05 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-07-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3313086501960001	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199601252025052001	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A3. NAMA : YENNI NUR FATMAWATI	A7. NIK : 3313086501960001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	13,921,040
2.	TUNJANGAN ISTRI	795,488
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	796,620
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,033,046
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	17,546,194
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	877,310
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	699,035
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,576,345
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	15,969,849
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	15,969,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 13 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-07-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 714327079532000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199304262025051001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : FERDIAN SETYA NUGRAHA	A7. NIK : 3311062604930004
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	13,921,040
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,392,104
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	1,013,880
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,056,929
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	18,383,953
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	919,198
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	727,374
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,646,572
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	16,737,381
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16,737,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 13 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-07-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3521102312010003	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 200112232025051001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : MUHAMMAD AKMAL ALFIQRI	A7. NIK : 3521102312010003
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	13,921,040
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	506,940
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,001,202
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	16,429,182
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	821,459
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	661,249
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,482,708
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14,946,474
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	14,946,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 13 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-07-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3471022107900002	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199007212025051001	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : DAVID GILANG SUHARYONO	A7. NIK : 3471022107900002
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	13,921,040
2.	TUNJANGAN ISTRI	1,392,104
3.	TUNJANGAN ANAK	556,843
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	2,027,760
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,078,993
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	19,976,740
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	998,837
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	753,824
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,752,661
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	18,224,079
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	18,224,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal KARANGANYAR, 13 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1 . 2 12-2025-1

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2025-07-01 - 2025-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 3313156307990001	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 199907232025052002	A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A3. NAMA : LUFIKA HERAWATI LUKITO	A7. NIK : 3313156307990001
A4. PANGKAT/ : Pengatur / II/c GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH Ps.21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	13,921,040
2.	TUNJANGAN ISTRI	397,744
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	651,780
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	2,017,124
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	16,987,688
PENGURANGAN :		
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	849,384
11.	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	680,142
12.	ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	1,529,526
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	15,458,162
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	15,458,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
23.	PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : null	D.4 Tanggal : KARANGANYAR, 13 January 2026
D.2 Nama Instansi Pemerintah : DJOKO NUGROHO	
D.3 ID Instansi Pemerintah : 198104272009021002	